

# Pariwisata, Keadilan Sosial, dan Keberlanjutan: Dampak Kebijakan Pariwisata terhadap Kehidupan Masyarakat Pulau Tomia, Wakatobi

Journal of Humanity and Social Justice.  
Volume 8 Issue 1, 2026. 1-22  
Journal Homepage:  
<http://ojs.isjn.or.id/index.php/journalhsj>  
e-ISSN: 2657-148X

*Tourism, Social Justice, and Sustainability: The Impact of Tourism Policies on the Lives of the People of Tomia Island, Wakatobi*

Marwan <sup>1</sup>

## ARTICLE INFO

**Keywords:** social justice; socio-economic conflict; tomia community; tourism policy; wakatobi

**Kata kunci:** keadilan sosial; kebijakan pariwisata; konflik sosial-ekonomi; masyarakat tomia; wakatobi

### How to cite:

Marwan. (2025). Pariwisata, Keadilan Sosial, dan Keberlanjutan: Dampak Kebijakan Pariwisata terhadap Kehidupan Masyarakat Pulau Tomia, Wakatobi. *Journal of Humanity and Social Justice*, 8(1), 1-22.

## ABSTRACT

Tourism is one of the leading sectors in developing national and local economic growth, especially after the COVID-19 pandemic. As one of the Indonesian tourist destinations in the "10 Bali Baru" Program, Wakatobi Regency is expected to develop its tourism to support the economic growth. As part of Wakatobi, the Tomia people face social and economic dynamics when responding to tourism policies in this region. This study discusses the impact of tourism policies on the Tomia people. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, literature study, and official websites. Using sustainable development theory, this study's findings demonstrate that tourism policies on Tomia Island, in addition to increasing state revenue, also support local economic development, such as job and business creation. Furthermore, tourism development can promote cultural and environmental preservation and food security. However, tourism management also creates inequality in economic distribution, lacks local community involvement, lacks support for women, creates social conflict, and threatens food security and local culture.

### Abstrak

Pariwisata adalah salah satu sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah terutama setelah Pandemi COVID-19. Sebagai salah satu destinasi pariwisata dalam program "10 Bali Baru" pemerintah pusat, Kabupaten Wakatobi diharapkan dapat mengembangkan pariwisata demi mendorong pertumbuhan

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.  
Email: [marwan@unhas.ac.id](mailto:marwan@unhas.ac.id)

## DOI:

<https://doi.org/10.38026/jhsj.v8i1.89>

Copyright: © 2025 Marwan

This work is licensed under a CC BY

4.0 [Creative Commons Attribution 4.0](#)[International License](#).

*ekonomi berkelanjutan dan menciptakan keadilan sosial. Masyarakat Pulau Tomia yang merupakan bagian dari Masyarakat Wakatobi menghadapi dinamika sosial dan ekonomi sebagai respon atas berbagai kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan ini. Penelitian ini mengkaji lebih dalam dampak kebijakan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat Tomia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi pustaka dan pengumpulan informasi dari website resmi. Dengan menggunakan teori pembangunan berkelanjutan, temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pariwisata di Pulau Tomia selain meningkatkan penerimaan negara juga mendukung pengembangan ekonomi masyarakat lokal seperti terciptanya lapangan kerja dan pembukaan bisnis. Selain itu, pengembangan pariwisata juga dapat mendorong pelestarian budaya dan lingkungan serta ketahanan pangan. Namun di sisi lain, pengelolaan pariwisata melahirkan ketimpangan dalam distribusi ekonomi, kurangnya pelibatan masyarakat lokal, minimnya dukungan terhadap perempuan, terciptanya konflik sosial dan terancamnya ketahanan pangan serta budaya lokal.*

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat global, nasional dan lokal. Pariwisata dapat menarik investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja hingga dalam konteks yang lebih luas, sektor ini dapat menyumbang devisa bagi suatu negara. Pariwisata juga dapat memberikan dampak yang berantai (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi seperti akan mendorong tumbuhnya UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), akomodasi, transportasi hingga sektor jasa lainnya. Selain itu, pariwisata juga sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi di tengah berbagai disrupsi ekonomi sehingga negara tidak bergantung pada salah satu sektor pertumbuhan ekonomi saja.

Pentingnya pariwisata juga dapat dilihat setelah berakhirnya Pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap ekonomi termasuk di sektor pariwisata yang terdampak secara signifikan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dari sini pemerintah melakukan langkah-langkah penting agar pariwisata kembali bangkit pasca COVID-19. Berbagai program yang dilakukan seperti pemberian insentif dan program pendukung agar pariwisata bisa bangkit kembali (Sutrisno, 2021). Langkah pemerintah ini dianggap penting untuk memastikan pariwisata tetap bisa diandalkan dalam mendukung ekonomi lokal dan nasional termasuk ikut mendorong pemulihan ekonomi global.

Akan tetapi, idealnya pariwisata tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi. Pariwisata harus memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan yakni menjaga keseimbangan tiga hal yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan hidup yang lestari dan aspek sosial budaya (UNWTO, n.d.). Pariwisata yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata seringkali merusak eksistensi lingkungan dan sosial budaya yang ada. Hal itu dapat dilihat pada pengembangan pariwisata di

Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan nilai budaya setempat (Kurnianingtyas & Pratama, 2024). Destinasi pariwisata Taman Wisata Candi Borobudur, meskipun memberikan dampak positif terhadap ekonomi, di sisi lain justru mengikis kearifan lokal masyarakat (Hamzah et al., 2018). Penelitian yang dilakukan Waluya, dkk. (2021) juga menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata juga merusak alam dan budaya masyarakat Baduy. Kunjungan wisatawan yang berlebihan dan tidak terkontrol karena hanya fokus pada tujuan ekonomi justru mengganggu pelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya masyarakat lokal (Berselli et al., 2021; Capocchi et al., 2019; Sri Widari, 2022)

Sementara itu, lingkungan dan nilai sosial budaya menjadi bagian integral atau daya tarik wisata itu sendiri. Beberapa pengelolaan pariwisata di Indonesia menjadi contoh yang bisa menjelaskan ini, misalnya pada pengelolaan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Setyanto & Winduwati, 2017), Desa Wisata di Kabupaten Sumbawa (Pattaray, 2021), Pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cikondang Jawa Barat (Syarifuddin, 2020) dan pariwisata Pulau Samosir Sumatera Utara (Pardede & Suryawan, 2016). Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jika pengelolaan pariwisata dapat mengkombinasikan pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Depari, 2024; UNWTO, 2020).

Salah satu daerah fokus pada pengembangan sektor pariwisata adalah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini memiliki keanekaragaman ekosistem bawah laut dan keindahan panorama alam sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Kekayaan bawah lautnya menjadikan daerah ini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan domestik dan mancanegara (Satria, 2020). Wakatobi juga ditetapkan sebagai salah satu cagar biosfer oleh PBB karena keragaman hayati dimilikinya (Yanti, dkk., 2024). Bahkan oleh pemerintah pusat, Wakatobi ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau dimasukkan dalam program "10 Bali Baru" bersama sembilan destinasi pariwisata lain di Indonesia. Pemerintah menginginkan adanya pusat-pusat pariwisata baru di Indonesia yang berskala internasional yang akan menjadi icon pariwisata Indonesia.

Salah satu destinasi di Wakatobi adalah Pulau Tomia. Pulau ini merupakan salah satu pulau utama dalam empat pulau dalam gugusan Kepulauan Wakatobi. Di Tomia terdapat dua kecamatan yakni Kecamatan Tomia Timur dan Tomia. Berbagai keindahan destinasi pariwisata yang dimiliki oleh Pulau ini membuat para pelaku pariwisata ikut terlibat dalam aktivitas kepariwisataan. Hal itu dapat dilihat dengan keberadaan perusahaan asing, PT Wakatobi Dive Resort (WDR). Tidak hanya swasta yang terlibat, masyarakat serta pemerintah tentunya memainkan peran dalam pelaksanaan pariwisata di pulau ini.

Untuk mendukung pelaksanaan pariwisata berkelanjutan tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan/regulasi. Di tingkat pusat, Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu taman nasional di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7661/KPTS-II/2002. Salah satu isi dalam surat keputusan ini adalah Wakatobi memiliki wilayah khusus pariwisata yang perlu dikembangkan dan dijaga. Ada juga Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun

2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Regulasi ini menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, ada Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2016-2025. Perda ini mengatur tentang visi, misi, strategi dan tujuan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi. Regulasi ini tentunya sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 9 Tahun 2021 dan status Taman Nasional Wakatobi tersebut di atas. Dalam hal pengimplementasian berbagai regulasi tersebut, Pemerintah Wakatobi juga menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Wakatobi. Pemerintah juga terus mempromosikan Wakatobi seperti mengadakan kegiatan rutin tahunan yakni Wakatobi Wave (Tarifu, 2022; Yanti, dkk., 2024; Rianse, dkk., 2024; Hasiati, 2024). Karena Pulau Tomia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi, maka berbagai kebijakan tersebut di atas terimplementasi juga di Pulau Tomia.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Pulau Tomia tentunya melahirkan dinamika tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tomia. Pariwisata telah memberikan dampak sosial dan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat lokal. Terdapat masyarakat lokal yang merespon kebijakan pariwisata tersebut dengan membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Marwan & Isnaeni, 2022). Di sisi lain, konflik sosial juga terjadi akibat keberadaan pariwisata (Suaib & Syifatu, 2016). Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktivitas nelayan kerap kali tidak sejalan dengan kepentingan pariwisata bawah laut (Al Dilwan, dkk., 2019). Hal ini memicu konflik sosial dan ekonomi. Selain berpotensi melahirkan konflik sosial, di kehidupan sosial budaya juga pariwisata seringkali mengikis kearifan lokal masyarakat dan tentunya menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal (Khan, dkk., 2020; Basyar, & Hariyoko, 2024; Manuhutu & Rediyasa, 2024). Namun, di sisi lain juga pariwisata justru membangkitkan budaya lokal yang mulai memudar (Husna, dkk., 2023).

Melihat dinamika sosial ekonomi masyarakat Tomia akibat kebijakan dan pengelolaan pariwisata tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian mendalam. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengetahui dampak kebijakannya dalam konteks keadilan sosial dan keberlanjutan. Selain itu, bagaimana masyarakat merespon serta dinamika sosial ekonomi masyarakat sebagai konsekuensi dari pengelolaan pariwisata tersebut. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan kajian serta referensi bagi para stakeholders terutama para pemegang kebijakan untuk melaksanakan pariwisata berkelanjutan di Pulau Tomia secara khusus dan Wakatobi secara umum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Mensah (2019) pembangunan berkelanjutan mencakup keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan penghargaan sosial budaya. Ketiga pilar tersebut saling terkoneksi dan terintegrasi. Teori ini juga dilekatkan pada pengelolaan pariwisata yang kemudian disebut dengan pariwisata berkelanjutan

(*sustainable tourism*). Terkait pembangunan berkelanjutan, Suwanto (2023) menjelaskan tentang bagaimana kebijakan perubahan iklim di Indonesia dalam konsep pembangunan berkelanjutan dapat mengakomodasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) 2015 tentang upaya mengatasi krisis iklim. Menurutnya, konsep pembangunan berkelanjutan penting untuk mencegah krisis iklim/lingkungan sekaligus dapat menciptakan ekonomi yang mensejahterakan dan melindungi hak-hak sosial budaya masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Assajid, dkk. (2024) yang menjelaskan tentang kebijakan Desa Landungsari Kabupaten Malang dalam konteks pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dijelaskan bahwa konsep pembangunan di Desa Landungsari hanya berfokus pada ekonomi dan sosial namun tidak memenuhi syarat pembangunan berkelanjutan dalam aspek perlindungan lingkungan. Artinya, pembangunan berkelanjutan tidak terwujud apabila aspek pelestarian lingkungan tidak diakomodasi. Menurut Rosana (2018) pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara umum masih belum menekankan pada aspek perlindungan lingkungan. Lebih lanjut, menurutnya, jika paradigma pembangunan berkelanjutan diterapkan maka akan menjadi jalan keluar bagi persoalan lingkungan yang ada. Selain itu, lingkungan yang terjaga akan mendukung kehidupan sosial manusia dan ekonomi yang juga berkelanjutan.

Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, Lestari dan Firdausi (2017) menjelaskan pariwisata berkelanjutan memberikan arah Pemerintah Kota Batu dalam pembangunan pariwisata yang ideal. Menurut dua peneliti ini, Pemerintah Kota Batu berhasil memadukan antara aspek kesejahteraan, proteksi lingkungan dan juga keadilan sosial. Penelitian lain yang menggunakan teori pariwisata berkelanjutan dilakukan oleh Rimadevi, dkk. (2022) yang menjelaskan bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan di Pantai Ngliyep. Dijelaskan bahwa implementasi pariwisata berkelanjutan di Pantai Ngliyep meningkatkan kegiatan ekonomi, menjaga budaya lokal masyarakat serta memberi dampak secara tidak langsung pada lingkungan. Dari penjelasan antara pembangunan berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki prinsip yang sama yakni memadukan aspek manfaat ekonomi, kelestarian lingkungan dan terjaganya nilai sosial budaya masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini maka akan dilihat dampak kebijakan pariwisata di Pulau Tomia dalam konteks keadilan sosial dan keberlanjutan. Hal ini juga mencakup dampaknya terhadap lingkungan dimana dinamika lingkungan pada pengelolaan pariwisata akan ikut berdampak pada keadilan di sektor lain seperti ekonomi dan sosial budaya masyarakat Tomia. Demikian juga sebaliknya, dinamika sosial dan ekonomi akan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan.

Terdapat beberapa penelitian tentang pariwisata di Pulau Tomia. Penelitian yang dilakukan Tarani & Rosnani (2025) hanya menekankan pada aktivitas perusahaan PT WDR dan hanya terbatas pada interaksinya dengan masyarakat. Namun tidak menjelaskan tentang dampak ekonomi dan sosialnya secara jelas. Penelitian lain juga hanya menyoroti tentang perlunya keterlibatan seni budaya dalam pengelolaan pariwisata pada salah satu destinasi wisata di Tomia (Sani, 2016).

Akan tetapi penelitian ini tidak menjelaskan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Lebih lanjut, ada juga studi tentang potensi pengembangan wisatawan non-bahari di Pulau Tomia (Umar, 2018) dan studi tentang inventarisasi objek wisata di Pulau Tomia (Husain, dkk., 2020). Kedua penelitian tersebut tidak menjelaskan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat Tomia. Dalam tinjauan geografis, studi yang dilakukan Suryani & Sari (2021) menjelaskan tentang bagaimana salah satu objek pariwisata di Tomia dikembangkan. Selain itu, studi yang dilakukan Puspita (2024) juga hanya membahas salah satu destinasi wisata, bukan Tomia secara umum, kemudian mengungkapkan dampak ekonomi yang ditimbulkan sedangkan dampak secara sosial budaya tidak dijelaskan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alauddin, dkk. (2016) menyoroti pada pola kehidupan Suku Bajo di Pulau Tomia setelah Wakatobi ditetapkan sebagai Taman Nasional Wakatobi. Sedangkan masyarakat non-bajo tidak dicakup. Studi ini pun dilakukan sudah cukup lama yakni 2016 ke belakang. Artinya potensi perubahan pola hidup Suku Bajo hingga tahun 2025 ini masih cukup dinamis. Dari semua penelitian tersebut belum ada studi tentang dampak kebijakan pariwisata terhadap masyarakat Pulau Tomia dalam konteks keadilan dan keberlanjutan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat Tomia secara umum, termasuk dalam relasi dengan keberlanjutan lingkungan yang memiliki hubungan saling mempengaruhi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan yakni dari bulan Februari sampai Agustus 2025. Metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih dalam serta mencari makna dibalik suatu fenomena (Nurhayati, dkk., 2024). Data dalam penelitian ini berupa data deskriptif atau bentuk kata-kata. Dalam penyajian datanya dilakukan secara sistematis dengan cara deskriptif atau instrumen kata-kata (Waruwu, 2024). Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi tentang dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Tomia akibat kebijakan pariwisata. Dampak sosial yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan pengelolaan pariwisata memberi dampak, baik mendukung nilai sosial budaya masyarakat setempat maupun dampak lainnya yakni tergerusnya nilai sosial budaya. Di bidang ekonomi akan dianalisa lebih mendalam tentang dinamika dampak ekonomi akibat keberadaan pariwisata di Pulau Tomia. Selain itu studi ini juga menganalisis dinamika dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan perubahan ekonomi dan sosial masyarakat Tomia.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, melalui website resmi yang relevan serta studi pustaka seperti artikel jurnal maupun buku. Data dari website resmi seperti desa-kahianga.com yang merupakan website resmi Desa Wisata Kahianga yang ada di Pulau Tomia; jadesta.kemenpar.go.id milik Kementerian Pariwisata; antranews.com dan telisik.id sebagai media berita; wakatobi.com sebagai website PT WDR; dan Website Badan Pusat Statistik (BPS) Wakatobi juga digunakan untuk menemukan data-data relevan untuk memperkuat analisis dalam penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan

UNWTO (United Nations World Tourism Organisation), organisasi pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, artikel jurnal berasal dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Demikian juga buku diperoleh melalui e-book resmi yang disediakan oleh lembaga resmi. Data-data yang telah dihimpun tersebut terlebih dahulu akan dikategorisasikan. Setelah itu dilakukan reduksi data sesuai relevansi dan kebutuhan penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara mendalam dan dilakukan penyajian/penulisan hasil penelitian serta penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Mendorong Aktivitas Ekonomi

Sebelum Masyarakat Tomia mengenal pariwisata, Wakatobi secara umum (termasuk Tomia di dalamnya) dikenal sebagai Daerah Kepulauan Tukang Besi dimana masyarakatnya berprofesi sebagai tukang besi (Wirayuda, 2020; Roslan & Sarpin, 2018). Selain itu, Masyarakat Wakatobi juga dikenal ikut terlibat dalam perdagangan rempah-rempah karena posisinya sebagai jalur perdagangan dari dan tujuan Maluku (Wirayuda, 2020). Bahkan kawasan ini menjadi jalur perdagangan rempah internasional di era kolonialisme (Salam, dkk., n.d.) Lebih lanjut, kondisi alam yang tidak terlalu mendukung aktivitas pertanian sehingga masyarakat Wakatobi mencari mata pencaharian di wilayah lain (Marwan, 2022; Wirayuda, 2020).

Namun dalam perkembangannya, kondisi tersebut mulai berubah. Masyarakat Wakatobi, terutama Masyarakat Tomia, mulai meninggalkan profesi sebagai tukang besi dan pedagang rempah-rempah. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia secara umum dan Wakatobi secara khusus mulai semakin memperkenalkan pariwisata sebagai salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah maupun nasional. Dalam konteks ini, Wakatobi, termasuk Pulau Tomia di dalamnya, menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wakatobi dan tentunya dengan berbagai dukungan kebijakan lainnya (Marwan, 2022; Nur, dkk., 2025). Hal tersebut mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dalam hubungannya dengan pengelolaan pariwisata. Salah satunya adalah perusahaan asing dari Swiss, PT WDR (Wakatobi Dive Resort). Kehadiran PT WDR memberi manfaat tersendiri bagi masyarakat Wakatobi terutama terbukanya lapangan kerja (La Dia, dkk., 2021). Sehingga ketika masyarakat Pulau Tomia sudah meninggalkan profesi tukang besi dan perdagangan rempah, pariwisata menjadi salah satu solusi mata pencaharian masyarakat. Belum lagi secara makro, kehadiran perusahaan ini juga merupakan bagian dari skema penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga berkontribusi pada penerimaan negara (Ismail, dkk.; Rauf, 2024). Artinya, dalam konteks kontribusi terhadap penerimaan negara, PT WDR juga ikut memberikan manfaat ekonomi

Selain itu, kebijakan pariwisata di Wakatobi juga mendorong masyarakat untuk membangun Desa Wisata. Terdapat tiga desa wisata yang ada di Pulau Tomia yakni

Desa Kahianga, Kollo Soha dan Kulati (Jadesta.Kemenpar, n.d.). Aktivitas ekonomi terjadi di desa ini dimana masyarakat terlibat dalam beberapa kegiatan ekonomi seperti pembangunan UMKM dan rumah makan serta *homestay*. Salah satu UMKM adalah UMKM yang bergerak di bidang oleh-oleh yang fokus pada kerajinan bambu. Kerajinan ini berada di Desa Kahianga, salah satu desa di Pulau Tomia yang memiliki sumber daya alam bambu yang cukup banyak dan mendapat penghargaan sebagai Desa Wisata dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 (Desa-Kahianga, 2023). Pelaku UMKM ini memanfaatkan bambu untuk dikreasikan menjadi kerajinan tangan yang estetik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari kerajinan tangan berupa satu set teko yang terbuat dari bambu dengan harga Rp. 150.000,- (Jadesta.kemenpar, n.d.). Modal untuk membuat satu set teko tersebut kurang dari harga jual karena bahan dasarnya yakni bambu adalah komoditas yang murah dan mudah diperoleh karena jumlah yang melimpah di Pulau Tomia dan juga menjadi bernilai tinggi karena berhasil dijual ke pasar Eropa (Marwan, 2022).

Walaupun tidak terdapat di salah satu desa wisata di Pulau Tomia, terdapat juga UMKM lain yakni Hengge Gallery yang bergerak di bidang seni ukir (Marwan & Isnaeni, 2022). Di seni ukir, pelaku UMKM Hengge Galery membuat berbagai produk oleh-oleh atau cinderamata yang berbahan dasar seperti kayu, bambu bahkan cangkang atau kulit kerang yang tidak digunakan lagi. Hasil ukirannya bermacam-macam seperti gantungan kunci yang berbentuk ikan dan biota laut lainnya. Ini menjadi keunikan produk (*selling point*) yang menggambarkan keindahan bawah laut Pulau Tomia secara khusus dan Wakatobi secara umum. Jika dilihat, bahan utama yang digunakan oleh dua UMKM tersebut baik Hengge Gallery maupun pengrajin bambu tersebut adalah bahan yang mudah ditemukan di Pulau Tomia. Dengan kata lain, bisnis ini adalah usaha yang berbasis lokalitas (kearifan lokal) atau memanfaatkan potensi daerah untuk kemajuan ekonomi. Peluang bisnis ini ke depan cukup besar terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata. Selain itu, akan mendorong masyarakat Tomia untuk lebih berpartisipasi dalam bisnis tersebut.

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menciptakan rantai ekonomi yang panjang dan kompleks (Marwan & Isnaeni, 2022; Shvets, 2020). Artinya, UMKM dalam pariwisata tidak hanya berhenti pada kerajinan tangan. Usaha lain dapat tercipta yang merupakan rantai efek domino dari pariwisata itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat bisnis restoran dan kuliner. Terkait restoran, dalam laporan BPS Wakatobi (2025), terdapat kenaikan jumlah restoran di Pulau Tomia yakni di tahun 2021 terdapat 3 (tiga) restoran menjadi 6 (enam) restoran di tahun 2024. Walaupun dalam laporan tersebut tidak terdapat informasi tentang berapa jumlah karyawan yang bekerja, tetapi kenaikan jumlah tersebut mengindikasikan adanya peningkatan permintaan pasar atau aktivitas ekonomi.

Dalam hal UMKM kuliner, bisnis ini bisa dilihat pada salah satu objek wisata Pulau Tomia yakni Pantai Lakota dimana masyarakat lokal membuka bisnis kuliner (Puspita, 2024). Efek rantai ekonomi ini merupakan hal yang alamiah terjadi karena kehadiran pengunjung ke destinasi wisata akan memicu lahirnya dampak ekonomi lain terutama hadirnya UMKM kuliner. Kuliner menjadi salah satu pelengkap dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung destinasi. Demikian juga di objek wisata

Puncak Waruu Tomia, masyarakat Tomia membuka usaha kuliner sambil menikmati panorama Tomia yang indah (Wirawan & Karno, 2023; Telisik, 2021). Di antara kuliner yang diujakan adalah makanan tradisional seperti kasoami dan dianggap sebagai *icon* kuliner dalam pariwisata Wakatobi (Ambarwati, 2019). Makanan ini juga dianggap sebagai salah satu simbol budaya lokal. Kuliner ini akan semakin memiliki nilai tambah apabila disajikan dengan hasil-hasil laut (*seafood*) yang merupakan pangan khas masyarakat Tomia. Bisnis kuliner terutama kuliner lokal merupakan bisnis potensial bagi masyarakat Tomia apalagi menu-menu yang disediakan merupakan makanan khas daerah yang mudah diolah oleh masyarakat setempat. Bagi wisatawan, mengonsumsi kuliner lokal akan menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi pengalaman yang unik sehingga bisnis ini masih cukup menjanjikan dalam pengelolaan pariwisata di Tomia.

Efek rantai ekonomi lain dari pariwisata di Pulau Tomia adalah munculnya *homestay-homestay* atau penginapan yang disediakan bagi pariwisata baik domestik maupun mancanegara. *Homestay* merupakan salah satu bisnis jasa pariwisata dengan modal yang terjangkau oleh masyarakat lokal. Pasalnya, *homestay* biasanya adalah rumah warga yang sebagian dan atau seluruh kamarnya digunakan untuk bisnis ini. Dalam konteks harga, setiap akomodasi memiliki beragam level harga sehingga para pengunjung memiliki alternatif dalam memilih sesuai dengan kemampuan dana serta preferensi lain yakni dari harga Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.500.000,- (Jadesta.kemenpar, n.d.). BPS Wakatobi (2024) menyebutkan jumlah *homestay* tahun 2022 yakni sebanyak 22 *homestay* dengan jumlah kamar sebanyak 26. Jumlah ini meningkat di tahun 2024 menjadi 38 *homestay* dengan jumlah kamar 48 (BPS Wakatobi, 2025). Tahun 2022 bisa dikatakan adalah tahun dimulai pemulihan ekonomi dan pariwisata setelah Pandemi COVID-19 yang mendisrupsi ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Peningkatan jumlah *homestay* tersebut mengindikasikan bahwa ada geliat pertumbuhan pariwisata di Tomia yang menjadi bagian dari tumpuan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi *homestay* merupakan simbol partisipasi masyarakat lokal yang tidak harus membutuhkan modal besar sebagaimana dalam bisnis perhotelan. Pariwisata juga mendorong pengembangan bisnis di sektor transportasi baik darat maupun laut di Tomia. Transportasi laut semakin bergeliat karena melayani mobilitas manusia yang semakin intens yang keluar dan masuk Pulau Tomia. Sementara itu, transportasi darat juga semakin terdorong. Apalagi infrastruktur pendukung terutama jalan utama semakin baik. Hal ini karena mendapat adanya alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah terutama pemerintah pusat melalui skema kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau 10 Bali baru (Pu, 2024).

Dari semua itu, dapat dilihat bahwa kebijakan pariwisata di Wakatobi (termasuk Pulau Tomia di dalamnya) telah menimbulkan manfaat ekonomi. Ekonomi pariwisata juga menimbulkan efek ekonomi berantai (*multiplier effects*) yang mendorong munculnya aktivitas ekonomi lain. Tata kelola yang baik tersebut telah membuka ruang-ruang partisipasi berbagai elemen termasuk masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang bermuara pada kesejahteraan. Inilah yang diharapkan dari keberadaan sektor pariwisata di Tomia secara berkelanjutan.

## Ketimpangan Distribusi Ekonomi

Meskipun dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang manfaat ekonomi pariwisata terhadap masyarakat lokal, namun jika dilihat dari perspektif keadilan sosial, distribusi manfaat pariwisata di Tomia masih timpang. Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana akses ekonomi dan pekerjaan terkait pariwisata. Walaupun PT WDR membuka lapangan kerja, namun masyarakat lokal hanya menjadi tenaga kerja (buruh) dengan level rendah seperti tukang bersih, cuci dan pelayan (Suaib & Syifatu, 2016; Marwan, 2014;). Sementara itu, posisi-posisi penting di perusahaan ditempati oleh mereka yang bukan dari masyarakat pribumi bahkan didominasi pekerja dari luar negeri (Wakatobi.com, n.d.; Suaib & Syifatu, 2016). Ketimpangan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. PT WDR yang sudah berdiri puluhan tahun, idealnya harus bisa mengkader dan kemudian merekrut masyarakat lokal sebagai karyawan yang menempati posisi elit di perusahaan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan. Ketidakadilan ekonomi lain adalah dapat dilihat pada konflik antara buruh PT WDR yang mengkritik kebijakan perusahaan yang tidak menaati regulasi ketenagakerjaan seperti pemberian gaji karyawan dengan jumlah yang masih di bawah UMR (Suaib & Syifatu, 2016; Marwan, 2014). Ada ketidakadilan distribusi ekonomi di sini. Dari sini dapat dilihat bahwa walaupun PT WDR membuka lapangan kerja namun terdapat masalah-masalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang juga ikut dihadirkan.

Untuk terlibat dalam industri pariwisata dalam skala yang lebih besar, masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan yang cukup. Mereka hanya terlibat dalam pengembangan ekonomi pariwisata dalam skala kecil seperti dalam hal penyediaan *homestay*, kuliner, UMKM dan juga bisnis wisata penyelaman dengan fasilitas yang kalah dibanding PT WDR yang memiliki modal besar. PT WDR, misalnya, dengan modal yang dimilikinya mampu menyediakan bandara udara secara mandiri untuk melayani tamu-tamunya untuk menikmati destinasi wisata di Tomia, serta dukungan fasilitas pendukung lainnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat lokal yang tidak memiliki akses permodalan yang besar sehingga hanya bisa terlibat di bisnis yang skala kecil. Sementara itu, pemerintah tidak melakukan intervensi yang cukup untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat dalam pariwisata. Pemerintah hanya memberikan modal dan pelatihan seperti dalam pengembangan UMKM walaupun sering tidak tepat sasaran dan cenderung asal-asalan yang salah satunya disebabkan oleh kinerja birokrasi yang tidak profesional (Marwan, 2022). Program ini pun tidak berkelanjutan yang disebabkan oleh dinamika politik lokal yakni perubahan kepemimpinan (bupati). Bupati yang baru terpilih biasanya akan mengabaikan bahkan membatalkan agenda bupati sebelumnya walaupun program tersebut cukup positif membantu masyarakat Tomia. Contoh yang bisa dilihat adalah Bupati Wakatobi Arhawi (2016-2021) saat memimpin Wakatobi memiliki program bantuan permodalan untuk mendorong aktivitas ekonomi pariwisata masyarakat Wakatobi secara umum dan Tomia secara khusus (Marwan & Isnaeni, 2022). Akan tetapi, saat Bupati Arhawi tidak terpilih kembali dan diganti oleh Bupati Haliana, program bantuan modal tersebut ditiadakan. Dengan kata lain, pemerintah dalam hal ini tidak serius dalam

memberikan dukungan kepada masyarakat Tomia untuk berkontribusi lebih secara ekonomi dalam pemanfaatan pariwisata. Hal ini berbeda dengan dengan PT WDR yang memiliki kapasitas modal yang besar dan tidak tergantung pada bantuan modal pemerintah. Bahkan perusahaan ini mendapat kemudahan dalam berbisnis seperti dukungan regulasi dari pemerintah (Marwan, 2022; Suaib & Syifatu, 2016; Marwan, 2014). Dari sini bisa dikatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata di Pulau Tomia, masyarakat lokal tidak memiliki akses atau kesempatan yang sama sebagaimana dimiliki oleh aktor ekonomi (swasta) yang memiliki modal dan kapasitas pendukung lainnya. Sementara itu pemerintah tidak mendukung masyarakat lokal secara serius. Artinya ada ketimpangan pemanfaat potensi pariwisata antara masyarakat lokal dan perusahaan swasta.

### **Pelestarian Budaya Lokal, Lingkungan dan Ketahanan Pangan**

Pariwisata di Pulau Tomia, seperti halnya di banyak tempat di Indonesia, menjadikan budaya sebagai bagian integral dari pariwisata itu sendiri. Oleh karenanya, pariwisata mendorong dilestarikannya budaya yang di dalamnya termasuk tradisi dan seni. Umumnya budaya atau kearifan lokal tersebut menghadirkan sesuatu yang unik karena menggambarkan kehidupan sosial masyarakat setempat/pribumi. Upaya-upaya untuk melestarikan budaya lokal tersebut tidak lepas dari adanya nilai tambah bagi pariwisata itu sendiri. Hal ini bisa dilihat kemampuan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia yang mengkombinasikan antara keindahan panorama alam dan budayanya yang unik (Situmeang, 2020). Alasan-alasan tersebut, masyarakat Tomia ikut melestarikan budaya seperti tari tradisional yakni Tari Kadandio dalam pengembangan pariwisata (Husna, dkk., 2023). Salah satunya caranya adalah dengan ditampilkan dalam *Wakatobi Wave*, sebuah festival pariwisata tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Tarifu, 2022; Yanti, dkk., 2024; Rianse, dkk., 2024; Hasiati, 2024). *Wakatobi Wave* sendiri sebagai strategi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mengenalkan keindahan dan keunikan Wakatobi ke nasional dan global.

Selain tari tradisional, sarung tenun tradisional Wakatobi atau biasa disebut dengan Sarung *Homoru* yang sebelumnya mulai dikesampingkan terutama oleh generasi muda di tengah perkembangan zaman, tapi dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata di Pulau Tomia maka sarung ini juga mendapat perhatian. Walaupun sudah mulai langkah, pengrajin sarung tradisional Wakatobi ini terpicu untuk memproduksi sarung jenis ini. Menurut Sani (2016), selain untuk tujuan ekonomi seperti di jual sebagai ole-ole untuk para wisatawan juga sebagai langkah untuk menghidupkan kembali salah satu simbol budaya masyarakat Pulau Tomia.

Jika konsep ekonomi ekstraktif seperti eksplorasi pertambangan sulit untuk menghindari kerusakan lingkungan, maka pariwisata yang menumpukan pada keindahan alam seperti di Pulau Tomia, mau tidak mau harus sejalan dengan logika konservasi lingkungan. Keindahan alam dan kelestarian ekosistem, baik darat maupun laut di Pulau Tomia, menjadi nilai jual tersendiri sama seperti destinasi pariwisata lain di Indonesia bahkan di dunia yang menekankan pada wisata alam. Dalam konteks budaya maritim masyarakat Tomia termasuk Suku Bajo di dalamnya yang berprofesi sebagai nelayan, kelestarian ekosistem laut akan mendukung

aktivitas ekonomi dan budaya mereka. Demikian juga di darat, budaya petani yang dilakoni oleh banyak masyarakat Tomia akan mendapat dukungan jika kelestarian lingkungan ikut terjaga. Kita dapat melihat bagaimana bencana alam dan banjir sering disebabkan karena pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Banyak pihak yang hanya fokus pada akumulasi profit atau pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama justru mengabaikan ekologi. Padahal mengabaikan pertimbangan lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi justru bisa merugikan secara ekonomi dalam jangka panjang (Mikho, dkk., 2021; Boar, dkk., 2020; Mensah, 2019). Di sinilah pentingnya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan logika pengembangan pariwisata di Tomia.

Dampak positif lain dari pariwisata juga tidak hanya bagi manusia, biota lain baik di darat maupun laut pun akan merasakan manfaat dari kelestarian lingkungan ini. Ini juga akan berdampak pada masa depan ketahanan pangan, terutama di Pulau Tomia yang memiliki sumber daya hayati di darat maupun di laut yang cukup banyak. Hal ini tidak mengherankan apabila Pemerintah Wakatobi secara khusus, menekankan pada pelestarian lingkungan dalam regulasinya (Marwan & Isnaeni, 2022; Nasrun, dkk., 2025).

Kelestarian lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung akan ikut memelihara budaya/kearifan lokal termasuk di sektor nelayan dan pertanian/perkebunan. Lingkungan yang terjaga di laut dapat membuat ekosistem biota laut akan lestari. Ketersediaan pangan laut pun akan besar. Demikian halnya dengan lingkungan di darat dalam hal ini tanah (kebun/ladang) yang subur atau terjaga maka potensi ketersediaan pangan pun akan lebih besar. Dalam konteks pembangunan kepariwisataan Tomia, konektivitas positif antara lingkungan, ekonomi dan eksistensi tradisi (budaya) lokal seperti tradisi ekonomi nelayan serta petani akan berkontribusi positif bagi pengembangan pariwisata di Tomia itu sendiri.

### **Kurangnya Pelibatan Masyarakat Lokal**

Walaupun demikian, partisipasi masyarakat lokal dalam kebijakan pariwisata perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini bisa dilihat dalam proses penetapan Wakatobi sebagai salah satu taman nasional di Indonesia yang tidak melibatkan masyarakat terutama nelayan Tomia. Hal ini memicu konflik nelayan dengan otoritas terkait baik pemerintah maupun pihak perusahaan wisata karena ruang gerak nelayan menjadi terbatas (Tarani & Rosnani, 2025). Ruang gerak nelayan tidak sebebaskan sebelum Wakatobi berstatus taman nasional. Pasalnya, beberapa wilayah telah dilarang untuk area penangkapan ikan. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara nelayan dan otoritas pengelola Taman Nasional Wakatobi. Ini terjadi karena nelayan tidak dilibatkan dalam perencanaan dan diskusi sebelum Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu taman nasional di Indonesia. Artinya, ada aspirasi nelayan Tomia yang tidak diakomodasi dalam kebijakan penetapan status taman nasional tersebut. Pola kebijakan *top-down* ini tidak selaras dengan nilai demokrasi yang harusnya berangkat dari penyerapan aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal. Apalagi terkait wilayah laut dimana Masyarakat Tomia yang sangat akrab dengan tradisi/budaya laut.

Selain itu terdapat juga masalah bagaimana masyarakat lokal dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Hal itu dapat dilihat dalam proses penentuan kawasan khusus pembangunan pariwisata dalam skema 10 Bali Baru di Wakatobi dimana masyarakat hukum adat (MHA) yang ada di Tomia tidak dilibatkan secara transparan bahkan cenderung menerima hasil kebijakan yang sifatnya *top-down* (Marwan, 2022). Banyak tanah-tanah adat dalam otoritas MHA sudah dipetakan sebagai lokasi pengembangan ekonomi pariwisata tanpa melibatkan pihak adat. Padahal, masyarakat adat secara tradisional adalah kelompok yang punya otoritas budaya terhadap masyarakat. Mereka terdiskriminasi dalam pengembangan pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah. Mereka dianggap sebagai objek pembangunan pariwisata, bukan subjek yang ikut berpartisipasi. Padahal pembangunan harus adaptif dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan itu nilai kearifan lokal dapat diserap dalam pembangunan pariwisata. Kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam kebijakan dan pembangunan pariwisata ini bisa menimbulkan masalah bahkan bisa menghambat pembangunan pariwisata di Pulau Tomia. Hal itu tampak dalam konflik atau aksi protes atas ketidakpuasan masyarakat lokal kepada pemerintah karena masyarakat tidak diakomodasi dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata tersebut (Al Dilwan, dkk., 2019). Justru yang ditakutkan adalah hanya kepentingan bisnis (swasta) dan pemerintah saja yang difasilitasi. Praktik yang lebih memprioritaskan kepentingan swasta (bisnis) dalam pengelolaan pariwisata ini merupakan hal yang sering terjadi di era kapitalisme hari ini.

### **Beban dan Masih Kurangnya Keterlibatan Perempuan**

Dalam mengembangkan pariwisata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Festival Wowine. Selain menjadi bagian dari promosi wisata, juga sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan Wakatobi atas peran-perannya selama ini dalam ekonomi dan pariwisata (Antara News, 2025). Perempuan bukan hanya dianggap sebagai ibu yang mengerjakan tugas-tugas ibu rumah tangga saja, tetapi juga ikut berperan dalam pelestarian budaya maritim termasuk budaya pariwisata Wakatobi (Tomia di dalamnya). Salah satu hal yang diperlihatkan dalam kegiatan ini adalah adanya kegiatan "Hekente". Kegiatan ini mempertontonkan kegiatan perempuan dalam menangkap ikan secara tradisional dan upaya perempuan untuk ikut penopang kegiatan ekonomi keluarganya. Model penangkapan ikan dalam konsep *hekente* tersebut adalah model penangkapan yang ramah lingkungan. Dari sini dapat dikatakan bahwa perempuan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan ikut meningkatkan ekonomi keluarga yang sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Selain itu, budaya *hekente* juga sebagai sesuatu yang unik karena menampilkan tradisi kearifan lokal dan tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri dalam pariwisata. Selain itu, peran perempuan lain juga dapat dilihat di salah satu desa di Tomia yakni Desa Kulati dimana kelompok ibu-ibu membuat produk UMKM seperti abon ikan sebagai ole-ole bagi pengunjung pariwisata (Marwan, 2022). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi dalam pengembangan pariwisata. Artinya, jika perempuan Tomia mendapat dukungan yang memadai dalam keterlibatannya dalam pembangunan pariwisata maka pengembangan pariwisata berkelanjutan akan lebih maksimal.

Namun demikian, peran perempuan juga mendapat tantangan. Hal ini dapat dilihat pada perempuan pelaku UMKM di Desa Lamanggau Tomia yang sering berhadapan dengan cuaca ekstrim saat melangsungkan aktivitas UMKM tersebut (Adri, 2021). Desa ini terpisah dari pulau utama Tomia sehingga untuk membeli bahan-bahan sembako sebagai bahan dasar membuat produk UMKM harus menyebrang lautan. Kondisi ini bisa berbahaya apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Artinya, dalam kondisi yang tidak mendukung ini, aktivitas UMKM juga akan ikut terdampak. Selain itu, menurut Kodir, dkk., (2020) ruang akses untuk pengembangan pariwisata di Tomia cenderung didominasi oleh pemerintah dan pelaku industri swasta, sedangkan masyarakat lokal termasuk perempuan di dalamnya ruang gerak itu minim. Peran perempuan dalam pengembangan pariwisata dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi juga kurang mendapat tempat (Bonni, 2001). Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa isu-isu perempuan dalam pariwisata di Tomia masih perlu mendapat perhatian. Sejauh ini perempuan memiliki niat untuk ikut terlibat dalam aktivitas kepariwisataan. Sayangnya, dukungan terhadap mereka masih kurang maksimal. Oleh karena itu, pemerintah sebagai otoritas legal-formal perlu melakukan langkah-langkah yang tepat agar perempuan dapat menjalankan fungsinya dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, kolaborasi berbagai pihak perlu juga dilakukan karena isu gender dalam pembangunan seperti ini umumnya tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Jika dukungan tersebut tidak dioptimalkan maka beban perempuan akan semakin berat, selain melakoni tugas lain yakni berperan sebagai ibu rumah tangga. Senada dengan itu, peran perempuan juga akan selalu terbatas dalam pengelolaan pariwisata.

### **Konflik dan Ancaman Ketahanan Pangan Lokal**

Bentuk adanya ketidakadilan dalam kebijakan serta pengelolaan pariwisata ini juga tercermin dalam relasi PT WDR yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat Tomia. Walaupun PT WDR dalam pengelolaan pariwisata menciptakan lapangan kerja, kehadiran perusahaan asing ini juga menciptakan masalah sosial. Dalam konteks ini adalah kehadiran Bandara Udara Maranggo milik perusahaan ini yang berlokasi di Pulau Tomia. Bandara ini dibuat untuk mendukung kegiatan bisnis pariwisatanya. Para tamu (pengunjung) ke resort wisata milik PT WDR akan menggunakan bandara ini sehingga mereka tidak bergantung pada Bandara Matahora yang berada di Pulau Wangi-wangi, Ibu Kota Kabupaten Wakatobi. Resort wisata ini juga terkategori cukup elit sehingga tamu-tamu yang datang pun terkategori dari kalangan ekonomi atas. Akan tetapi eksistensi bandara mendapat resistensi dari banyak masyarakat Pulau Tomia. Pasalnya, banyak masyarakat menganggap bahwa bandara dibangun secara ilegal dengan mencaplok tanah-tanah milik warga (Marwan, 2022; Suaib & Syifatu, 2016; Marwan, 2014). Pengambilalihan tanah secara ilegal tersebut juga dilegitimasi oleh pemerintah (Marwan, 2022). Artinya konflik ini sebenarnya antara masyarakat lokal melawan pemerintah dan PT WDR.

Konsekuensi dari hilangnya tanah akibat perampasan secara ilegal tersebut adalah banyak masyarakat tidak bisa lagi menggantungkan aktivitas pertanian dan ekonominya di atas tanah tersebut. Sebagian tanah mereka telah menjadi bandara dan sebagiannya lagi telah diklaim sebagai wilayah yang eksklusif bagian dari bandara

itu sendiri. Sayangnya, pemerintah terutama Pemerintah Daerah (pemda) Wakatobi belum bisa menyelesaikan masalah tersebut atau mengembalikan hak-hak warga sebagai pemilik tanah (Marwan, 2022). Bahkan Pemda Wakatobi terkesan membiarkan dan ikut melegitimasi perampasan tanah tersebut. Oleh karenanya, sampai sekarang masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah maupun para aktivis sosial di Tomia untuk memperoleh tanah tersebut kembali.

Tantangan lain dalam pengelolaan pariwisata di Pulau Tomia adalah ada gesekan atau konflik antara nelayan (termasuk Suku Bajo Tomia di dalamnya) dan sektor pariwisata (Sahari, dkk., 2024; Marwan, 2022). Ada perebutan lahan dimana nelayan sering diusir atau diarahkan untuk tidak mencari ikan dan hasil laut lainnya di tempat yang dianggap sebagai zona khusus pariwisata (Marwan, 2022; Suaib & Syifatu, 2016). Hal ini terjadi setelah ada sistem zonasi atau pemetaan wilayah sebagai konsekuensi ditetapkannya Wakatobi sebagai salah satu taman nasional di Indonesia. Dalam sistem zonasi ini, terdapat kawasan tertentu dimana nelayan tidak bisa lagi memasukinya karena telah diperuntukkan untuk kegiatan tertentu yang salah satunya adalah pariwisata.

Konsekuensi dari berkurangnya ruang gerak nelayan adalah akan mengancam ketersediaan pangan lokal dalam hal ini ikan dan hasil laut lainnya. Selain itu, hal lain yang mengancam ketahanan pangan lokal masyarakat Tomia adalah adanya pergeseran profesi masyarakat yang sebelumnya nelayan menjadi pekerja/pelaku di sektor pariwisata. Padahal hasil tangkap nelayan merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat Tomia sejak dulu bahkan hasil laut tersebut sering dijual ke pasar di luar Pulau Tomia. Selain itu, menurut Bahar (2023) aktivitas pariwisata di Wakatobi telah banyak merusak karang. Karang sebagaimana diketahui merupakan bagian dari ekosistem perkembangbiakan ikan. Ini akan mengancam jumlah ikan dan tentunya bisa mempengaruhi hasil tangkap serta menurunnya pangan lokal. Perlu juga diketahui bahwa pariwisata merupakan sektor yang belakangan hadir untuk menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat lokal. Profesi nelayan adalah aktivitas ekonomi tradisional masyarakat Tomia yang lebih dulu dari pariwisata.

### **Terkikisnya Nilai Budaya Lokal**

Terkikisnya orisinalitas budaya lokal Tomia karena budaya seperti tarian serta pertunjukan seni budaya lain terjebak dalam logika komersialisasi (Manuhutu, dkk., 2024). Seni dan budaya hanya dianggap sebagai komoditas untuk memberikan nilai tambah pariwisata. Padahal budaya terkandung nilai historis dan kehidupan lain yang inspiratif. Hal itu bisa dilihat dari Tari Kadandio, salah satu tari tradisional Pulau Tomia, dimana seni tradisional ini terkandung pesan tentang keberanian, keuletan dan pentingnya persatuan dalam hidup bermasyarakat (Husna, dkk., 2023). Ini adalah modal penting bagi harmonisasi sosial bermasyarakat bahkan dalam konteks sistem politik, nilai ini bisa menjadi pendukung kokohnya demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Sayangnya, seringkali para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tidak memaknai serta tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sosial serta demokrasi pada masyarakat Tomia, terlebih di era desentralisasi dimana konflik sosial cukup rentan di momen

sebelum, saat dan setelah kontestasi demokrasi di Pulau Tomia khususnya dan di Wakatobi umumnya. Konsep ideal ini tidak diinternalisasi oleh para pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata di Tomia.

Selain itu, kehadiran pariwisata juga mengikis kearifan lokal atau budaya masyarakat setempat (Khan, dkk., 2020; Basyar & Hariyoko, 2024; Manuhutu, dkk., 2024). Hal ini disebabkan karena kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara juga ikut membawa budaya dan nilai sosial di negaranya (asing) yang kadang tidak sesuai dengan budaya masyarakat lokal. Jika masyarakat lokal tidak sadar dan tidak menyaring (filter) serta pemerintah tidak melakukan hal-hal yang berarti maka secara sadar maupun tidak sadar, nilai-nilai budaya lokal masyarakat Tomia akan memudar.

Di sisi lain, pembangunan pariwisata di Pulau Tomia juga mengancam eksistensi ekonomi Masyarakat Bajo yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam hal ini adalah gesekan antara pariwisata dan sektor perikanan terutama setelah Wakatobi mendapatkan status sebagai taman nasional (Sahari, dkk., 2024; Marwan, 2022). Walaupun persentase Masyarakat Bajo minoritas, Bajo juga ikut menjadi bagian dari komposisi demografi masyarakat Tomia (La Ola, dkk., 2020). Bajo yang biasa juga dikenal dengan suku laut ini tidak mudah beradaptasi dengan hadirnya pariwisata. Pasalnya, mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan sejak turun temurun. Hidup dan rumah mereka pun umumnya di laut atau pinggir laut atau terkoneksi dengan laut (Marwan, 2022). Sementara itu, status Wakatobi sebagai salah satu taman nasional membuat ruang gerak nelayan menjadi terbatas (Marwan, 2022; Suaib & Syifatu, 2016). Pasalnya, dalam sistem zonasi tersebut ada wilayah yang dulunya bisa digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan, sekarang wilayah tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk kegiatan nelayan. Artinya, kondisi ini bisa mengurangi hasil tangkap dari aktivitas nelayan Masyarakat Bajo yang secara langsung akan mengancam ekonominya.

Sementara itu, Masyarakat Bajo adalah suku yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas nelayan. Menjadi nelayan adalah bukan hanya aktivitas ekonomi tetapi juga aktivitas kebudayaan Suku Bajo. Posisi ini membuat Masyarakat Bajo tidak mudah melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi, selain dari aktivitas nelayan. Ini berbeda dengan masyarakat Tomia non-Bajo yang dengan mudah beradaptasi dalam mencari sumber-sumber ekonomi. Pasalnya, masyarakat Tomia non-Bajo sudah terbiasa mendiversifikasi mata pencaharian mereka seperti bertani, berdagang, termasuk menjadi nelayan. Dengan kata lain, perkembangan pariwisata yang tidak termanajemen dengan baik yang dapat menggeser budaya dan eksistensi komunitas Bajo bisa mengancam eksistensi ekonomi mereka. Perlu diketahui, Masyarakat Adat Tomia adalah pengelola wilayah adat sebelum hadirnya regulasi tentang kepariwisataan dan wilayah adat tersebut mencakup darat dan laut (Al Dilwan, dkk., 2019).

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan pariwisata di Pulau Tomia telah memberikan beberapa dampak. Di bidang ekonomi, kebijakan tersebut telah berkontribusi untuk membuka lapangan kerja baik sebagai pekerja di industri (perusahaan) pariwisata maupun membuka usaha (bisnis) yang terkait pariwisata. Selain itu, pariwisata di Pulau Tomia juga berkontribusi pada penerimaan negara dengan kehadiran investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) seperti keberadaan PT WDR. Di bidang sosial, kebijakan pariwisata di Pulau Tomia juga mendorong masyarakat untuk ikut melestarikan budaya atau kearifan lokalnya. Budaya lokal dianggap sebagai sesuatu yang integral terhadap pariwisata karena memberi nilai tambah terhadap ekonomi pariwisata. Bahkan nilai sejarah dan sosial dari budaya tersebut jika diimplementasikan akan dapat mendukung harmonisasi kehidupan sosial dan politik. Selain itu, pembangunan pariwisata di Pulau Tomia juga ikut mendorong ketahanan pangan yang akan mendukung kehidupan sosial masyarakat Tomia. Ketahanan pangan ini terjadi karena kebijakan pariwisata yang mendorong pelestarian lingkungan sebagai pendukung utama eksistensi pangan lokal.

Walaupun demikian, dalam perspektif keadilan sosial, pengelolaan pariwisata di Pulau Tomia menimbulkan ketimpangan dalam distribusi atau manfaat ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada akses ke posisi penting di PT WDR dimana orang-orang lokal hanya menempati posisi pekerjaan dengan hierarki yang rendah. Sementara itu, posisi dengan hierarki yang tinggi sebagian besar ditempati oleh orang asing. Demikian juga dalam hal permodalan, akses permodalan bagi masyarakat lokal masih terbatas sehingga berdampak pada keterlibatannya dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan juga terbatas. Dalam perencanaan pengelolaan Taman Nasional Wakatobi, nelayan lokal tidak dilibatkan. Hal ini berkonsekuensi pada lahirnya konflik antara nelayan dan otoritas pengelola taman nasional. Keterlibatan MHA Tomia juga dibatasi dalam pengelolaan pariwisata. Padahal kelompok adat ini memiliki otoritas kultural dalam menjaga lingkungan dan budaya lokal yang juga ikut menunjang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Masalah lainnya adalah beban kerja perempuan dalam pariwisata terutama dalam mengembangkan UMKM. Beban kerja ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga perlu usaha yang lebih untuk bisa maksimal. Selain itu, masih minimnya peran perempuan dalam keterlibatannya di pariwisata. Beban dan minimnya keterlibatan perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari masih kurangnya dukungan pemerintah dan belum terbangunnya kolaborasi yang maksimal dengan pihak lain.

Lebih lanjut, dalam kebijakan pariwisata ini, terdapat juga konflik tanah antara masyarakat lokal melawan pemerintah yang berkolaborasi dengan PT WDR dalam pembangunan Bandara Marango milik PT WDR. Konsekuensinya, masyarakat lokal tidak lagi bisa menggunakan tanah tersebut untuk bertani/berkebun dan kegiatan sosial budaya lainnya. Selain itu, konflik nelayan dengan otoritas pengelola Taman Nasional Wakatobi juga terjadi. Hal ini disebabkan karena kebijakan sistem zonasi yang membuat wilayah tangkap nelayan berkurang. Selain itu, terjadi pergeseran profesi dari nelayan menjadi pelaku pariwisata yang berkonsekuensi pada

terancamnya ketahanan pangan masyarakat lokal. Pengelolaan pariwisata di Tomia juga berkonsekuensi pada terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Realitas ini dapat dilihat pada tari tradisional seperti Tari Kadandio yang terjebak pada logika kapitalisme. Tari tradisional tersebut hanya menjadi komoditas untuk melayani kepentingan ekonomi pariwisata. Selain itu, banyaknya kunjungan wisatawan ke Tomia berpotensi juga mengikis nilai-nilai kearifan/budaya lokal masyarakat setempat. Pasalnya, para pengunjung sering membawa nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

## REFERENSI

- Adri, J. (2021). Tinjauan Keberhasilan Umkm Di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Akademik Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 1-4.
- Agustan, Rianse, U., Sukotjo, E., & Faslih, A. (2024). Exploration and implementation of a smart tourism destination with the 6As framework & TOPSIS (case study: Wakatobi, Indonesia). *Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (SREES)*, 33(4), 419-442. <https://doi.org/10.22630/srees.9760>
- Al Dilwan, M., Astina, I. K., & Bachri, S. (2019). *Pariwisata Wakatobi dalam Perspektif Produksi Ruang* (Disertasi Program Doktor, Universitas Negeri Malang).
- Ambarwati, A. (2019). *Nusantara dalam Piringku*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- AntaraneWS (22 Agustus 2025) Festival Wowine Wakatobi Angkat Ketangguhan Maritim. Diakses pada 10 September 2025, di <https://sultra.antaraneWS.com/berita/517133/festival-wowine-wakatobi-angkat-ketangguhan-perempuan-maritim>
- Assajid, S., Khoiron, K., & Sekarsari, R. W. (2024). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Desa: Langkah Strategis Pemenuhan SDGs Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 170-180.
- Bahar, A. (2023). Tourism sustainability is a big problem in the development of marine tourism in Indonesia. In *Routledge Handbook of Trends and Issues in Tourism Sustainability, Planning and Development, Management, and Technology* (pp. 103-110). New York: Routledge.
- Basyar, M. R., & Hariyoko, Y. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata pada Daerah Pesisir di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. 4(06), 29-42.
- Basyar, M. R., & Hariyoko, Y. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata Pada Daerah Pesisir Di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi*. 4(06), 29-42.
- Berselli, C., Pereira, L. A., Limberger, P. F., & Pereira, T. (2021). Overtourism: Residents' Perceived Impacts of Tourism Saturation. *Tourism Analysis*, 27(2), 161-172. <https://doi.org/10.3727/108354221x16187814403074>
- Boar, A., Bastida, R., & Marimon, F. (2020). A systematic literature review. Relationships between the sharing economy, sustainability and sustainable development goals. *Sustainability*, 12(17), 6744.

- Bonni, G. (2001). Community Participation in Marine Protected Area Management: Wakatobi National Park, Sulawesi, Indonesia. *Coastal Management*, 29(4), 295–316. <https://doi.org/10.1080/089207501750475118>
- Badan Pusat Statistik Wakatobi (2024) *Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2024*, Wakatobi: Badan Pusat Statistik Wakatobi
- Badan Pusat Statistik Wakatobi (2025) *Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2025*, Wakatobi: Badan Pusat Statistik Wakatobi
- Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, M., & Amaduzzi, A. (2019). Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives. *Sustainability*, 11(12), 3303, 1-18. <https://doi.org/10.3390/su11123303>
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *Circle Archive*, 1(5): 1-13.
- Desa-Kahianga (21 November, 2023) *Intip Pesona Kearifan Lokal Desa Kahianga*, Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://desa-kahianga.com/intip-pesona-kearifan-lokal-desa-kahianga/>
- Hamzah, F., Hermawan, H., & Wigati, W. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 5(3), 195–202. <https://doi.org/10.31294/par.v5i3.4434>
- Hasiati, S. (2024). *Event Tourism Sebagai Marketing Public Relations Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Dalam Pembentukan Citra Destinasi Wisata (Studi Kasus Event Tahunan Wakatobi Wave 2022)*. Disertasi Program Doktor Universitas Mercu Buana-Menteng.
- Husna, U.I., Hadarat, A., Hayari, A.H., (2023) Sejarah Tari Kadandio Di Desa Timu Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi: 1960-2018, *Sorume: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 1(2), 126-136.
- Ismail, F. F. P., Panjaitan, R. A., Marpaung, V. H., & Siswajanthry, F. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 30-41.
- Jadesta.Kemepar (n.d.) *Bamboo Teko Set*, Diakses pada 26 Agustus 2025, di [https://jadesta.kemepar.go.id/paket/bamboo\\_teko\\_set](https://jadesta.kemepar.go.id/paket/bamboo_teko_set)
- Jadesta.Kemepar (n.d.) *Desa Wisata Kahianga (Dewi Kahyangan)*, Diakses pada 26 Agustus 2025, di [https://jadesta.kemepar.go.id/desa/kahianga\\_dewi\\_kahyangan](https://jadesta.kemepar.go.id/desa/kahianga_dewi_kahyangan)
- Jadesta.Kemepar (n.d.) *Desa Wisata Kollo Soha*, Diakses pada 26 Agustus 2025, di [https://jadesta.kemepar.go.id/desa/kollo\\_soha](https://jadesta.kemepar.go.id/desa/kollo_soha)
- Jadesta.Kemepar (n.d.) *Desa Wisata Kulati*, Diakses pada 26 Agustus 2025, di <https://jadesta.kemepar.go.id/desa/kulati>
- Kementerian PUPR (1 Januari, 2024) *Kementerian PUPR Lanjutkan Penataan KSPN Wakatobi, 4 Destinasi Siap Sambut Wisatawan Libur Tahun Baru*, Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-lanjutkan-penataan-kspn-wakatobi-4-destinasi-siap-sambut-wisatawan-libur-tahun-baru>
- Khan, A. M., Musthofa, I., Aminuddin, I., Handayani, F., Kuswara, R. N., Wulandari, A., ... & Novianti, E. (2020). Wisata Kelautan Berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi

- Tenggara: Sebuah Studi Tentang Persepsi Masyarakat Kawasan Pesisir. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 11(2), 155-163.
- Kodir, A., Ahmad, R., & Pratama, N. H. (2020). *The dynamics access on tourism governance in wakatobi national park. Geojournal of Tourism and Geosites*, 32 (4), 1376–1383.
- Kurnianingtyas, A. P., & Pratama, K. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang). *EDUTOURISM Journal of Tourism Research*, 5(02), 355–370. <https://doi.org/10.53050/ejtr.v5i02.705>
- La Dia, W. O. I. W., Dewi, H. K., Wahyudi, H. D., & Sulton, A. A. A. M. (2021, May). Inovasi Branding Destinasi Wisata Alam Kabupaten Wakatobi Selama Pandemi Covid-19. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 509-516).
- La Ola, T., Wianti, N. I., & Tadjuddah, M. (2020). Bridging dan bonding social capital: analisis relasi sosial masyarakat pulau-pulau kecil di Taman Nasional Wakatobi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(01), 30-46.
- Lestari, A. W., & Firdausi, F. (2017). Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(3), 260-265.
- Manuhutu, F., & Rediyasa, I. W. (2024). Dampak Sosial-Ekonomi Pariwisata Terhadap Komunitas Adat Di Pulau Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 1393-1403.
- Marwan & Isnaeni, N. (2022). Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi). *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 123-153.
- Marwan (2014) *Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Wakatobi*, Skripsi Universitas Hasanuddin
- Marwan (2022) *Kemitraan Multi-Pihak Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Wakatobi (2015-2021)*, Tesis Magister Universitas Indonesia
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1). 1-21. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Mikhno, I., Koval, V., Shvets, G., Garmatiuk, O., & Tamošiūnienė, R. (2021). Green economy in sustainable development and improvement of resource efficiency. *Journal: Central European Business Review*, 10(1), 99-113
- Nasrun, N., Normayasari, N., Harudin, H., Ikhsan, N., Isman, K., Sahari, S., ... & Husain, S. A. (2025). Strategi Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Tolandono Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 7(1), 43-53.
- Nur, M., Barqi, S., Budihard, A. M., & Paluala, K. (2025). Analysis of the Real Economic Sector in Increasing the Human Development Index in Wakatobi Regency. *Arus International: Interdisciplinary Journal of Education, Humanities, Law, and Social Entrepreneurship*, 1(1), 24-33.

- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pardede, F. R. E. P., & Suryawan, I. B. (2016). Strategi pengelolaan kabupaten samosir sebagai daya tarik wisata alam di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(1), 1-11.
- Pattaray, A. (2021). Wisata Petualangan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Desa Wisata Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2247-2254.
- Puspita, T. N. (2024). *Studi Penerapan Branding "Kampung Teduh" Terhadap Daya Tarik Objek Wisata Pantai Lakota, Desa Waha, Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi*. Disertasi Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rauf, D. I. (2024). Dampak Investasi Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 2(1), 107-116.
- Rimadevi, G., Mindarti, L. I., & Hanafi, I. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 184-192.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).
- Roslan, S., & Sarpin, L. O. H (2018) *Pro Kontra Masyarakat Tentang Rencana Pemberlakuan Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi*. *Neo Societal* 3(1): 308-314
- Sahari, S., Ferlin, A., Alsita, I., Runtu, K. G. A., Mansyur, L. O., Isman, K., ... & Admadja, A. K. (2024). Kajian co-management berbasis multi pihak dalam pelestarian kawasan lindung laut warisan Masyarakat Adat Tomia "Pasi Tondu" Kecamatan Tomia, Wakatobi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9(2), 159-174.
- Salam, A., Putra, I.N.D., Sudiby, Taum, Y.Y., Yoesoef, M., Wiyatmi, Widyastuti, T., Ismawati, E., Suantoko, & Wibowo, P.A.W. (2021) *Sastra Rempah• VOLUME 1*. Sleman: PT Kanisius.
- Sani, M. Y. (2016). Orang Tomia: Komunitas Maritim Dan Kepariwisata Di Wakatobi. *Walusuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 51-62.
- Satria, A. (2020). *Dinamika Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia: Studi Kasus Wakatobi*. *Jurnal Ekonomi Pariwisata*, 15(1), 42-58.
- Setyanto, Y., & Winduwati, S. (2017). Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata Berwawasan Lingkungan dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan (Studi pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 164-175.
- Shvets, I. Y. (2020). Multiplier effects of the development of socially responsible tourism. *EurAsian Journal of BioSciences*, 14(2), 3753-3758.
- Situmeang, I. V. O. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata: Menciptakan Seminyak Menjadi Top of Mind Tujuan Wisata Di Bali. *Scriptura*, 10(1), 43-52.
- Sri Widari, D. A. D. (2022). Interaksi dan Dampak Sosial Budaya dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Sosiologi USK* 16(1), 42-55. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25608>
- Suaib, E., & Syifatu, W. (2016). Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan. *Journal of Political Research*, 13(2), 167-191.

- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 167-185.
- Suwatno, D. (2023). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 328-340. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.47076>
- Syarifuddin, D. (2020). Nilai Budaya Tanam Padi sebagai Daya Tarik Wisata. *Media Wisata*, 18(2), 263-274.
- Tarani, S. P., & Rosnani, R. (2025). Implementasi Ekowisata PT. Wakatobi Dive Resort dalam Upaya Konservasi Maritim di Pulau Tomia Kabupaten Wakatobi. *Journal of International and Local Studies*, 9(1), 39-45.
- Tarif, L. (2022). Promosi Pariwisata Internasional Wakatobi: Suatu Strategi Pemerintah Daerah. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 155-165.
- Telisik (28 April 2021) *Puncak Kahianga Jadi Tempat Ngabuburit Favorit Masyarakat Tomia*, Diakses pada 26 Agustus 2025, di <https://telisik.id/news/puncak-kahianga-jadi-tempat-ngabuburit-favorit-masyarakat-tomia>
- UNWTO (2020). *Tourism and the SDGs: The Case of Bali, Indonesia*. World Tourism Organization.
- UNWTO (n.d.) *Sustainable Development*. Diakses pada 4 Juni 2025, dari <https://www.unwto.org/sustainable-development>
- Wakatobi.com (n.d.) *The People Behind The Wakatobi Experience*, diakses pada 6 September 2025, di <https://www.wakatobi.com/about-us/people/>
- Waluya, B., Malihah, E., Ruhimat, M., & Wiyantarti, E. (2021). Kajian Nilai-Nilai Saba Budaya Baduy sebagai Modal Sosial untuk Menjaga Lingkungan dari Ancaman Kerusakan Akibat Pariwisata. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(2), 191-200.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Wirawan, R., & Karno, E. (2023). Analisis Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Di Kawasan Objek Wisata:(Studi Kasus Wisata Puncak Kahianga Kecamatan Tomia Timur). *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 251-260.
- Wirayuda, A. W. (2020). *Kota dan jejak aktivitas peradaban*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yanti, E. R., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2024). Upaya Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi Dalam Meningkatkan Pariwisata Melalui Event Nasional Dan Internasional Di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 5432-5442.